

IDENTITAS INKLUSIF DALAM PENGANGGARAN DISABILITAS

Risma Wira Bharata¹⁾, Siti Afidatul Khotijah²⁾, Nuwun Priyono³⁾

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

¹Email: rismawirab@untidar.ac.id

²Email: khotijah_afi@untidar.ac.id

³Email: nuwunpriyono@untidar.ac.id

Abstract

This study aims to measure the implementation of inclusive identity in disability budgeting in Gunungkidul district. A district that has proclaimed itself as an inclusive district since 2014. This research will be analyzed based on a review of government documents and field studies on budgeting for persons with disabilities. The research method used is descriptive analysis, where descriptive analysis depicts or describes the data as it is. The results of this study indicate that inclusive identity in disability budgeting can be concluded that it has been well implemented, with scores obtained mostly above 4 out of 5.

Keywords: *Inclusive Identity, Budgeting, Welfare of Persons with Disabilities*

1. PENDAHULUAN

Diskriminasi penyandang disabilitas masih menjadi perhatian untuk segera dapat dipecahkan. Hal ini, dapat dilihat dari berbagai permasalahan bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk penyandang disabilitas. Pada tahun 1997, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Pasal 4 dijelaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui: kesamaan kesempatan (aksesibilitas, pendidikan, dan pekerjaan), rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Penelitian Ariyulinda (2010) menemukan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tidak secara efektif diimplementasikan. Hal ini, didukung oleh

Harahap dan Bustanuddin (2015) menyatakan bahwa terbaikannya masalah penyandang disabilitas disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak kepada penyandang disabilitas.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dengan menganggarkan berbagai program dan kegiatan untuk penyandang disabilitas. Program dan kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas berupa pembangunan fasilitas umum yang aksesibel, program pemberdayaan ekonomi, dan program bantuan sosial. Pada saat ini, banyak pemerintah daerah memproklamkan sebagai kota atau kabupaten inklusif. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah tentang penyandang disabilitas dan harus lebih banyak menganggarkan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Identitas sebagai kota atau kabupaten inklusif merupakan sebuah identitas pemerintah daerah yang perhatian terhadap penyandang disabilitas. Identitas entitas akan membantu memfasilitasi integritas entitas dan

menyelaraskan dengan lebih baik apa yang dikatakan dan dilakukan entitas, didukung dengan para pegawai sering dianggap sebagai duta yang mendasari identitas dan citra organisasi mereka, yang diharapkan dapat menjunjung tinggi dan menampilkan nilai sosial dan etika organisasi mereka (Powell, Elving, Dodd, & Sloan, 2009). Identitas pada tingkat organisasi, khususnya dalam kaitannya dengan aspek etika dari identitas organisasi, telah muncul sebagai bidang minat yang meningkat dan fokus di antara akademisi dan praktisi karena citra organisasi lebih merupakan potret identitas organisasi yang dapat mempengaruhi pada kredibilitas dan reputasi organisasi (Powell M. S., 2011).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan meneliti identitas inklusif dalam penganggaran penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Pemilihan obyek penelitian di kabupaten Gunungkidul karena kabupaten Gunungkidul adalah kabupaten pertama yang memproklamkan sebagai kabupaten inklusif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014, selain itu, kabupaten Gunungkidul juga telah mempunyai Perda No 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif ini meliputi beberapa hal, yakni distribusi frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan pengukuran variabilitas (Wiyono, 2001). Secara umum langkah-langkah dalam menerapkan metode analisis deskriptif yang pertama yaitu melakukan perumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis data dan hasil penelitian tentang identitas inklusif dalam penganggaran terhadap

kesejahteraan penyandang disabilitas. Penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahannya dan menganalisis hasil untuk mengetahui hasil dari penelitian ini.

Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul dipilih sebagai objek penelitian mengingat bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten pertama yang memproklamkan sebagai Kabupaten inklusif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014, serta saat ini kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, di Kabupaten Gunungkidul urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib (urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan Urusan pemerintahan pilihan.

Penelitian ini melibatkan 24 responden baik dari pegawai pemerintahan maupun penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah responden dari pegawai Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8 responden dan penyandang disabilitas sebanyak 16 responden, dengan jumlah reponden perempuan sebanyak 12 responden sedangkan responden laki-laki berjumlah 12 responden. Pegawai yang mengisi kuisisioner berasal dari unit kerja yang berbeda. Disabilitas juga berasal dari daerah yang berbeda dan tentunya jenis disabilitas juga berbeda.

Pendistribusian kuisisioner kepada respon dibagikan melalui bantuan media sosial dengan menggunakan *google form* hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dikarenakan tempat domisili responden yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Adapun hasil dari kuisisioner yang dibagikan yaitu sebagai berikut:

| No | Klasifikasi | Skor Disabilitas | Skor Pegawai Penda |
|----|---|------------------|--------------------|
| 1 | Data | 4,16 | 4,43 |
| 2 | Pengembangan Masyarakat/Partisipasi Politik | 4,26 | 4,46 |
| 3 | Perumahan | 3,98 | 3,96 |
| 4 | Kesehatan | 4,42 | 4,48 |
| 5 | Perlindungan dan Pelayanan Sosial | 4,28 | 4,15 |
| 6 | Pendidikan | 4,34 | 4,34 |
| 7 | Olahraga, Seni & Rekreasi | 4,36 | 4,19 |
| 8 | Tenaga Kerja | 4,40 | 4,10 |
| 9 | Akses Terhadap Keadilan dan Perlindungan | 4,43 | 4,33 |
| 10 | Pengurangan Risiko Bencana | 4,48 | 4,34 |
| 11 | Transportasi Umum | 4,06 | 3,71 |

Dengan menggunakan data angket yang menggunakan skala likert maka diperoleh hasil seperti yang di tampilkan pada tabel diatas yang mana dari tabel tersebut jumlah skor yang didapatkan dibedakan berdasarkan jenis responden dan juga berdasarkan sub bab pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengolah data tersebut. Peneliti menyusun kuisisioner dengan 11 klasifikasi yang berbeda untuk mengukur inklusifitas di Kabupaten Gunungkidul. Klasifikasi tersebut yaitu data, pengembangan masyarakat/partisipasi politik, perumahan, kesehatan, perlindungan dan pelayanan sosial, pendidikan, olahraga, seni & rekreasi, tenaga kerja, akses terhadap keadilan dan perlindungan, pengurangan risiko bencana serta transportasi umum. Jika dilihat dari klasifikasi diatas, aspek yang diukur tidak hanya dari sisi pelayanan sosial yang biasanya diberikan oleh Dinas Sosial saja, namun juga banyak aspek yang lain yang biasanya dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti aspek ketersediaan data dari BPS, aspek kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pendidikan oleh Dinas Pendidikan, dll. Dengan begitu, partisipasi untuk menciptakan kabupaten yang inklusif mendapatkan kontribusi dari berbagai pihak.

Aspek data adalah penilaian pertama yang diberikan. Terdapat 9 pertanyaan untuk mengukur kelengkapan data. Dari hasil kuesioner dan setelah dihitung rata-rata, dalam aspek data Kabupaten Gunungkidul mendapatkan skor 4,16 dari penilaian disabilitas dan 4,43 dari pegawai pemerintah daerah. Aspek kedua adalah Pengembangan Masyarakat/Partisipasi Politik yang mendapatkan skor 4,26 dari penilaian

disabilitas dan 4,46 dari pegawai pemerintah kabupaten. Aspek yang ketiga adalah Perumahan mendapatkan skor 3,98 dari penilaian disabilitas dan 3,96 dari pegawai pemerintah kabupaten. Aspek Kesehatan mendapatkan skor 4,42 dari penilaian disabilitas dan 4,48 dari pegawai pemerintah kabupaten. Aspek kelima adalah Perlindungan dan Pelayanan Sosial yang mendapatkan skor 4,28 dari penilaian disabilitas dan 4,15 dari pegawai pemerintah kabupaten.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang diukur juga, dengan hasil skor sama sebesar 4,34 dari penilaian disabilitas maupun dari pegawai pemerintah kabupaten. Sedangkan dari sisi Olahraga, Seni & Rekreasi, mendapatkan skor 4,36 dari penilaian disabilitas dan 4,19 dari pegawai pemerintah kabupaten. Di bidang tenaga kerja mendapatkan skor cukup tinggi dari penyandang disabilitas, yaitu sebesar 4,40 sedangkan dari pegawai pemerintah kabupaten sebesar 4,10. Jika menilai inklusifitas Kabupaten Gunungkidul dari sisi Akses Terhadap Keadilan dan Perlindungan, penyandang disabilitas dari memberikan nilai 4,43 dan 4,33 dari pegawai pemerintah kabupaten. Pengurangan resiko bencana menjadi aspek ke 10 yang juga dinilai dengan hasil penilaian sebesar 4,48 dari penyandang disabilitas dan 4,34 dari pegawai pemerintah kabupaten. Aspek terakhir yang dinilai adalah transportasi umum sebagai sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah, dan mendapatkan skor 4,06 dari penyandang disabilitas serta 3,71 dari pegawai pemerintah kabupaten.

Secara keseluruhan aspek yang dinilai sudah dianggap baik, dari penyandang disabilitas maupun dari pegawai pemerintah karena dari skor 1-5, hampir semua aspek mendapatkan skor diatas 4. Skor tertinggi didapatkan dari aspek pengurangan resiko bencana oleh penyandang disabilitas, sedangkan pegawai kabupaten menganggap aspek Pengembangan Masyarakat/Partisipasi Politik adalah yang tertinggi. Jika dilihat dari yang paling rendah, aspek perumahan merupakan aspek yang memiliki nilai rendah meskipun tidak terpaut jauh dari nilai-nilai yang lain. Namun dari sisi pegawai pemerintah menganggap transportasi umum adalah suatu kendala yang masih dihadapi

dan belum bisa memenuhi syarat sebagai kabupaten inklusif yang baik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran untuk penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja, namun juga dari instansi lainnya meskipun dalam praktiknya mereka tidak menjelaskan secara tersurat bahawa anggaran tersebut ditujukan untuk membentuk kabupaten yang inklusif.

Program dan kegiatan OPD untuk penyandang disabilitas diantaranya pelatihan, pemberian bantuan peralatan, pengikutsertaan disabilitas dalam berbagai kegiatan, pemberian fasilitas kesehatan, pendidikan, dll.

Identitas inklusif dalam penganggaran terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas dapat disimpulkan sudah baik penerapannya, dengan skor yang diperoleh sebagian besar diatas 4 dari 5.

Saran

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah menerapkan usaha untuk bisa membentuk kabupaten yang inklusif, meskipun belum sepenuhnya tercapai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak upaya yang perlu dilakukan dari berbagai pihak untuk membangun suatu daerah yang benar-benar inklusif dan dapat memberikan kesejahteraan bagi disabilitas dari semua aspek.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada yang berkontribusi pada penyelesaian naskah penelitian ini, yaitu Bappeda Gunungkidul, Dinas Sosial Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul, dan semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

6. REFERENSI

Akbar, R. (2011). Performance Measurement and Accountability in Indonesia Local Government. Curtin University.

Dewi, N. M., & Sudana, I. P. (2013). Pengaruh Penganggaran Partisipatif pada Senjangan

Anggaran dengan Budgetary Control dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Univervitas Udayana , 707-722.

Hansen, J. R., & Host, V. (2012). Understanding the Relationship Between Decentralization Organizational Decesion Structure, Job Context, and Job Satisfaction-A Survey of Danish Public Managers. *Review of Public Personell Administration*, 32(2) 288-308.

Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Peters, D. H., Chakraborty, S., Mahapatra, P., & Steinhardt, L. (2010). Job Satisfaction and Motivation of Heath Workers in Public and Private Sectors: Cross-Sectional Analysis from Two Indian States. *Human Resources for Health*.

Pfeffer, J. (1982; dalam DiMaggio & Powell, 1983). Organizations and organization theory. Boston: Pitman Publishing.

Powell, M. S. (2011). The nexus between ethical corporate marketing, ethical corporate identity and corporate social responsibility: An internal organisational perspective. *European Journal of Marketing*, Vol. 45, Issue: 9/10, 1365-1379.

Powell, S. M., Elving, W., Dodd, C., & Sloan, J. (2009). Explicating ethical corporate identity in the financial sector. *Corporate Communications: An International Journal*, Vol. 14 Issue: 4, 440-455.

Solikin, A. (2005). Accountability Reporting in Indonesia: When Self-Serving Attributions Exaggerate Perceived Performance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 21-33.

Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Indonesia.

Undang-Undang No 4 Tahun 1997. Indonesia.

Wahyuningrum. (2008). Hubungan Kemampuan, Kepuasan dan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Semarang: Tesis Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.